

Revitalisasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Berbasis Masyarakat di Nagari Panti Selatan Kabupaten Pasaman

Didi Al Amin, Melinda Noer, Devi Analia

Regional and Rural Development Study Program, Graduate School, Andalas University, Indonesia

*Correspondence to: didipansel6@gmail.com

Abstrak: Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Implementasi program di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait keberlanjutan dan partisipasi masyarakat setelah dukungan program berkurang. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program KRPL di Nagari Panti Selatan, serta merumuskan model revitalisasi berbasis masyarakat yang dapat mendukung keberlanjutan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode evaluasi program melalui pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan *Logical Framework Analysis (LFA)*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KRPL belum optimal, ditandai dengan rendahnya kemandirian kelompok, menurunnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana pendukung program. Analisis stakeholder menunjukkan adanya ketimpangan peran dan pengaruh antar aktor, dengan KWT sebagai pelaksana utama yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh terbatas dalam pengambilan keputusan program. Berdasarkan analisis LFA, akar permasalahan utama adalah ketergantungan terhadap bantuan eksternal, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan kurangnya integrasi program dalam kebijakan pembangunan nagari. Revitalisasi program diperlukan melalui penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan intensitas pendampingan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, integrasi program dengan pembangunan nagari, serta pengembangan orientasi ekonomi dari pemanfaatan pekarangan. Model revitalisasi berbasis masyarakat yang dihasilkan menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga secara berkelanjutan.

Kata Kunci: ketahanan pangan, KRPL, pemberdayaan masyarakat, revitalisasi program

Abstract: The Sustainable Food House Area (KRPL) program is one of the government's strategies to strengthen household food security through sustainable and community-based utilization of home yards. However, its implementation in various regions still faces challenges, particularly in terms of sustainability and community participation after program support declines. This study aims to evaluate the implementation of the KRPL program in Nagari Panti Selatan, Pasaman Regency, and to formulate a community-based revitalization model to enhance its sustainability. This research employs a descriptive qualitative approach using the CIPP (*Context, Input, Process, Product*) evaluation model and *Logical Framework Analysis (LFA)*. Data were collected through in-depth interviews, observations, *Focus Group Discussions (FGD)*, and document analysis. The results indicate that the implementation of the KRPL program has not been optimal, as reflected in the low level of group independence, declining community participation, and suboptimal utilization of program support facilities. Stakeholder analysis reveals an imbalance in roles and influence among actors, with the Women Farmer Groups (KWT) as the main implementers having high interest but limited influence in program decision-making. Based on the LFA, the root causes are dependency on external assistance, weak institutional capacity, and insufficient integration of the program into village development policies. Program revitalization is necessary through strengthening group institutions, increasing the intensity of assistance, implementing continuous monitoring and evaluation, integrating the program into village development, and developing economic-oriented activities from yard utilization. The proposed community-based revitalization model emphasizes the importance of stakeholder synergy in improving the effectiveness and sustainability of the program. This study contributes to the development of community empowerment models to support sustainable household food security.

Keywords: community empowerment, food security, KRPL, program revitalization

Citation: Amin, D. A., Noer, M., & Analia, D. (2026). Revitalisasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Berbasis Masyarakat di Nagari Panti Selatan Kabupaten Pasaman. *Indonesian Journal of Agricultural, Resource and Environmental Economics*, 5(1), 40-51.

Doi: <https://doi.org/10.29244/ijaree.v5i1.72881>

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan berbasis rumah tangga merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah pedesaan karena ketersediaan pangan pada tingkat nasional tidak selalu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga. Berbagai studi menunjukkan bahwa rumah tangga di negara berkembang masih menghadapi kerentanan pangan akibat keterbatasan akses ekonomi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta tingginya risiko terhadap guncangan eksternal seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan (Sisha, 2020). Selain itu, faktor struktural dan sosial seperti ketimpangan akses sumber daya dan lemahnya kelembagaan lokal turut memengaruhi kondisi ketahanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan ketahanan pangan tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan produksi secara makro, tetapi perlu diarahkan pada penguatan kapasitas rumah tangga sebagai unit terkecil dalam sistem pangan.

Dalam literatur internasional, pendekatan *household food security* menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan pada skala mikro. Pemanfaatan lahan pekarangan, diversifikasi tanaman pangan, serta akses terhadap penyuluhan dan input pertanian terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah tangga di wilayah pedesaan (Mota et al., 2019). Selain itu, keterlibatan aktif anggota rumah tangga, khususnya perempuan, dalam produksi pangan domestik juga berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasar. Dengan demikian, penguatan produksi pangan berbasis rumah tangga menjadi strategi yang relevan dalam mendukung pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan yang sejalan dengan konsep ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Program ini menekankan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, diversifikasi pangan, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan sebagai pengelola utama pangan keluarga. Keberhasilan program ketahanan pangan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kepemilikan aset, dan kapasitas kelembagaan lokal (Akbar et al., 2023). Selain itu, sistem pangan rumah tangga juga tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan wilayah yang lebih luas, karena keberlanjutannya dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat lokal (Uphoff, 1992). Oleh karena itu, KRPL perlu dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi.

Program KRPL telah terbukti memberikan berbagai manfaat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara ekonomi, program ini mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan serta membuka peluang peningkatan pendapatan melalui penjualan hasil pekarangan (Purwantini et al., 2012). Dari sisi sosial, KRPL mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok wanita tani, sehingga memperkuat modal sosial dan kapasitas kolektif dalam pengelolaan sumber daya lokal (Kirana et al., 2024). Selain itu, secara lingkungan, program ini berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan limbah organik menjadi kompos yang mendukung pertanian berkelanjutan (Sugiarto et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa KRPL memiliki potensi sebagai instrumen pembangunan desa yang multifungsi.

Secara konseptual, istilah “kawasan” dalam KRPL tidak hanya merujuk pada kumpulan pekarangan rumah tangga, tetapi juga mencerminkan suatu sistem sosial-ekologis berbasis komunitas. Konsep kawasan dalam pembangunan wilayah pedesaan menekankan adanya interaksi antar rumah tangga, kelembagaan lokal, serta dukungan tata kelola yang membentuk sistem produksi dan konsumsi pangan lokal yang terintegrasi (Healey, 2004; Rodríguez-Pose, 2013). Selain itu, pendekatan kolektif dalam pengelolaan sumber daya lokal memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama dan penguatan modal sosial masyarakat (Pretty, 2003). Dengan demikian, keberhasilan KRPL tidak hanya ditentukan oleh aktivitas individu, tetapi oleh sinergi antar aktor dalam suatu wilayah.

Meskipun memiliki potensi yang besar, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan berbasis rumah tangga sering menghadapi kendala dalam aspek keberlanjutan. Program yang dirancang secara top-down cenderung menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan eksternal dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang (Uphoff, 1992). Selain itu, rendahnya

partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan program juga menjadi faktor penghambat keberhasilan program (Mota *et al.*, 2019; Akbar *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas dan peran masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.

Dalam konteks lokal, implementasi Program KRPL di Nagari Panti Selatan, Kabupaten Pasaman, menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih menghadapi berbagai tantangan. Nagari ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah pelaksana KRPL dengan tingkat prevalensi stunting yang masih relatif tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya, yaitu mencapai 24,3 persen (BPS Kabupaten Pasaman, 2023), serta tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata kabupaten sebesar 12,7 persen. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain menurunnya partisipasi masyarakat, lemahnya kelembagaan kelompok, serta ketergantungan terhadap pendampingan dan bantuan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program belum sepenuhnya mampu membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan secara berkelanjutan.

Untuk memahami efektivitas dan keberlanjutan suatu program, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh aspek pelaksanaan program. Evaluasi program merupakan proses sistematis untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan suatu program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan (Stufflebeam, 2003). Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang memungkinkan analisis menyeluruh terhadap kondisi program, mulai dari kesesuaian konteks hingga hasil yang dicapai. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan implementasi KRPL di tingkat lokal.

Sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan tersebut, pendekatan revitalisasi program berbasis masyarakat menjadi relevan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan KRPL. Revitalisasi dipahami sebagai upaya penguatan kembali fungsi program melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta penyesuaian strategi pelaksanaan dengan konteks sosial ekonomi setempat. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam proses ini, karena keberhasilan program sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya yang mereka kelola (Pretty, 1995). Studi menunjukkan bahwa program yang berbasis komunitas memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan karena didukung oleh modal sosial dan pengetahuan lokal (Pretty, 2003; Mardikanto, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah bahwa program KRPL di Nagari Panti Selatan belum optimal dalam membangun kemandirian masyarakat, dan model revitalisasi berbasis masyarakat yang menekankan penguatan kelembagaan, partisipasi, serta integrasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program KRPL di Nagari Panti Selatan serta merumuskan model revitalisasi berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan keberlanjutan program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan rumah tangga, serta menjadi referensi bagi penguatan kebijakan pembangunan wilayah pedesaan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu lokasi implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang menghadapi tantangan dalam keberlanjutan program dan kemandirian masyarakat setelah berkurangnya dukungan pemerintah. Selain itu, wilayah ini juga memiliki dinamika ketahanan pangan yang ditunjukkan oleh masih relatif tingginya prevalensi stunting dibandingkan wilayah sekitarnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi empiris di lapangan (Creswell, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan Program KRPL, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan strategi revitalisasi berbasis masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap fenomena sosial

secara kontekstual dan memahami makna serta pengalaman aktor yang terlibat dalam program. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap dinamika partisipasi masyarakat, peran kelembagaan lokal, serta interaksi antar stakeholder dalam pelaksanaan program.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan Program KRPL. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari anggota dan ketua KWT/PKK (6 orang), perangkat nagari (2 orang), penyuluh pertanian (2 orang), serta perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman (2 orang). Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada jumlah yang besar, tetapi pada kedalaman informasi yang dapat diperoleh (Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan pengalaman, FGD untuk memperoleh perspektif kolektif, observasi partisipatif untuk memahami praktik di lapangan, serta studi dokumentasi untuk melengkapi data empiris. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data melalui triangulasi (Creswell, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Selain itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell, 2018). Untuk mengevaluasi pelaksanaan program, penelitian ini menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003), yang memungkinkan penilaian program secara komprehensif mulai dari kesesuaian konteks hingga hasil yang dicapai. Hasil evaluasi kemudian dikategorikan menggunakan skala ordinal (1 = Kurang Baik, 2 = Cukup Baik, 3 = Baik) untuk menentukan tingkat kinerja program.

Dalam merumuskan model revitalisasi program, penelitian ini menggunakan pendekatan Logical Framework Analysis (LFA) yang diawali dengan analisis stakeholder, analisis pohon masalah (*problem tree*), dan pohon tujuan (*objective tree*). Analisis stakeholder dilakukan untuk mengidentifikasi aktor kunci berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap program (Reed *et al.*, 2009). Selanjutnya, *problem tree* digunakan untuk memetakan hubungan sebab-akibat dari permasalahan utama, yang kemudian ditransformasikan menjadi *objective tree* sebagai kondisi yang diharapkan. Tahap akhir adalah penyusunan kerangka logis (*logframe*) yang memuat tujuan, output, kegiatan, indikator, dan asumsi program. Pendekatan ini memungkinkan perumusan model revitalisasi KRPL yang sistematis, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan program (Gasper, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Karakteristik Informan

Nagari Panti Selatan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pasaman yang memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan potensi sumber daya lahan pekarangan yang cukup luas, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh penggunaan lahan untuk pertanian dan permukiman dengan kondisi agroekologi yang mendukung pengembangan tanaman hortikultura dan pangan lokal (BPS Kabupaten Pasaman, 2023; Kementerian Pertanian, 2020). Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan tingkat pendapatan yang relatif terbatas, sehingga ketahanan pangan rumah tangga masih sangat bergantung pada produksi sendiri maupun akses terhadap pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pekarangan melalui program KRPL memiliki relevansi yang tinggi dalam meningkatkan ketersediaan dan akses pangan rumah tangga secara berkelanjutan (Tyas *et al.*, 2025). Selain itu, pendekatan berbasis pemanfaatan sumber daya lokal dinilai efektif dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah pedesaan, terutama pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses ekonomi (FAO, 2019).

Karakteristik informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program KRPL, seperti anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), penyuluh pertanian, serta perangkat nagari. Mayoritas informan dari KWT merupakan ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda dalam mengelola rumah tangga sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan pertanian pekarangan. Dari sisi sosial, tingkat pendidikan informan relatif beragam, namun sebagian besar

berada pada tingkat pendidikan menengah, yang mempengaruhi kapasitas dalam mengadopsi inovasi dan pengelolaan program. Keterlibatan perempuan dalam program KRPL menunjukkan pentingnya peran gender dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga, terutama dalam aspek produksi, pengolahan, dan distribusi pangan (Sraboni *et al.* (2014). Dengan demikian, karakteristik informan yang beragam ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan program KRPL sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu, dukungan kelembagaan, serta dinamika sosial yang berkembang di tingkat masyarakat.

Evaluasi Pelaksanaan Program KRPL Berdasarkan Model CIPP

Evaluasi pelaksanaan Program KRPL dalam penelitian ini menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003). Model ini digunakan untuk menilai relevansi program, kesiapan sumber daya, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan hasil program secara komprehensif. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa perhitungan skor terhadap delapan indikator evaluasi, diperoleh nilai total 12 dari skor maksimum 24 atau sebesar 50 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KRPL di lokasi penelitian berada pada kategori cukup baik, dengan beberapa aspek yang telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih memerlukan penguatan terutama pada dimensi proses dan keberlanjutan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program KRPL

No	Dimensi CIPP	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Context	Kesesuaian Tujuan Program	2	Cukup Baik
2	Context	Kesesuaian Sasaran Penerima	2	Cukup Baik
3	Input	Perencanaan Program	3	Baik
4	Input	Pemanfaatan Bantuan	1	Kurang Baik
5	Process	Tahapan Pelaksanaan Program	1	Kurang Baik
6	Process	Partisipasi Masyarakat	1	Kurang Baik
7	Process	Monitoring & Pendampingan	1	Kurang Baik
8	Product	Keberlanjutan Program	1	Kurang Baik

a. Evaluasi Context (Konteks)

Evaluasi konteks dalam pelaksanaan Program KRPL di Nagari Panti Selatan menunjukkan bahwa program ini pada dasarnya memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih didominasi oleh kelompok berpendapatan menengah ke bawah serta ketergantungan terhadap pasar menjadikan program ini penting untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan pekarangan. Selain itu, ketersediaan lahan pekarangan yang cukup luas menjadi potensi yang dapat dioptimalkan melalui intervensi program KRPL. Namun demikian, dalam implementasinya, pemahaman masyarakat terhadap tujuan jangka panjang program masih terbatas, sehingga KRPL lebih dipersepsikan sebagai program bantuan daripada sebagai upaya pemberdayaan berkelanjutan (Tyas *et al.*, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan program berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kebutuhan lokal dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan program (Pretty, 1995).

Selain itu, dari sisi kebijakan, program KRPL belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nagari, sehingga dukungan kelembagaan dan keberlanjutan program menjadi terbatas. Kurangnya integrasi ini menyebabkan program berjalan secara parsial dan tidak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lokal. Padahal, menurut pendekatan evaluasi program, aspek konteks yang kuat ditandai dengan adanya dukungan kebijakan dan keselarasan program dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan wilayah (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kebutuhan program KRPL relevan, namun secara kelembagaan masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem pembangunan nagari.

b. Evaluasi Input (Masukan)

Evaluasi input dalam pelaksanaan program KRPL mencakup ketersediaan sumber daya yang mendukung, seperti bantuan sarana produksi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal program, input berupa bantuan bibit,

pupuk, serta pelatihan teknis telah diberikan kepada kelompok sasaran, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT). Bantuan ini berperan penting dalam mendorong partisipasi awal masyarakat dalam kegiatan KRPL. Namun, keberlanjutan input tersebut tidak terjamin, sehingga setelah bantuan berakhir, kegiatan kelompok cenderung mengalami penurunan (Tyas *et al*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap input eksternal masih cukup tinggi dan belum diimbangi dengan penguatan kapasitas internal kelompok.

Dari sisi sumber daya manusia, kapasitas anggota KWT dalam mengelola program masih terbatas, baik dalam aspek teknis budidaya maupun manajerial organisasi. Selain itu, keterbatasan jumlah dan intensitas pendampingan dari penyuluh pertanian juga menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program. Menurut teori evaluasi CIPP, input yang efektif tidak hanya mencakup ketersediaan sumber daya fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan sistem pendukung yang memadai (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan kapasitas kelembagaan kelompok sasaran (Mardikanto, 2017). Dengan demikian, aspek input dalam program KRPL masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pengembangan kapasitas dan keberlanjutan dukungan sumber daya.

c. *Evaluasi Process (Proses)*

Evaluasi proses menunjukkan bahwa pelaksanaan program KRPL pada tahap awal berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta partisipasi aktif anggota kelompok. Kegiatan tersebut didukung oleh pelatihan awal dan pendampingan dari penyuluh pertanian, sehingga mampu meningkatkan keterampilan dasar masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan. Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas kegiatan mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama setelah berkurangnya pendampingan dan dukungan dari pihak eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi program belum mampu membangun mekanisme internal yang kuat untuk menjaga keberlanjutan kegiatan (Arifin *et al.*, 2021).

Selain itu, proses pelaksanaan program masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar stakeholder. Kurangnya komunikasi dan sinergi antara pemerintah nagari, penyuluh, dan kelompok masyarakat menyebabkan program tidak berjalan secara optimal. Dalam perspektif evaluasi program, proses yang efektif ditandai dengan adanya koordinasi yang baik, partisipasi aktif, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi dan pendampingan menjadi salah satu faktor utama kegagalan program berbasis masyarakat (Mardikanto, 2017). Oleh karena itu, perbaikan pada aspek proses menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program KRPL.

d. *Evaluasi Product (Hasil)*

Evaluasi produk dalam program KRPL menunjukkan bahwa hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, baik dari segi output maupun outcome. Secara output, program telah mampu menghasilkan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura pada tahap awal. Namun, keberlanjutan kegiatan tersebut masih rendah, sehingga dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan rumah tangga belum terlihat secara signifikan. Selain itu, kontribusi program terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga juga masih terbatas, karena sebagian besar hasil produksi hanya digunakan untuk konsumsi sendiri (Tyas *et al*, 2025).

Dari sisi outcome, program KRPL belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pangan rumah tangga. Hal ini terlihat dari masih adanya ketergantungan terhadap bantuan eksternal dan rendahnya inisiatif masyarakat untuk melanjutkan kegiatan secara mandiri. Menurut teori evaluasi CIPP, keberhasilan program tidak hanya diukur dari output jangka pendek, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa program ketahanan pangan berbasis masyarakat memerlukan waktu dan proses pemberdayaan yang berkelanjutan untuk menghasilkan dampak yang signifikan (FAO, 2019). Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program KRPL masih memerlukan upaya revitalisasi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberlanjutan Program KRPL

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan dalam keberlanjutan program KRPL, baik yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat. Faktor internal meliputi adanya kesadaran sebagian anggota masyarakat, khususnya perempuan dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), mengenai pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Selain itu, dukungan sosial dalam kelompok serta pengalaman awal dalam kegiatan budidaya juga menjadi modal penting dalam mempertahankan aktivitas program. Dari sisi eksternal, keberadaan penyuluh pertanian serta bantuan awal dari pemerintah turut mendorong terbentuknya partisipasi masyarakat pada tahap awal program. Dalam perspektif pemberdayaan, partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program berbasis komunitas, karena menunjukkan adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan (Pretty, 1995; Mardikanto, 2017). Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan berbasis rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan dan dukungan kelembagaan lokal yang kuat (Sraboni et al. (2014).

Namun demikian, terdapat berbagai faktor penghambat yang menyebabkan program KRPL belum berjalan secara berkelanjutan. Faktor internal yang dominan adalah rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok, keterbatasan keterampilan manajerial, serta menurunnya motivasi anggota setelah berkurangnya dukungan eksternal. Sementara itu, dari sisi eksternal, keterbatasan pendampingan, tidak berkelanjutannya bantuan program, serta belum terintegrasinya KRPL dalam kebijakan pembangunan nagari menjadi kendala utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa program masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya berbasis pada penguatan kapasitas lokal. Dalam kajian kelembagaan, keberlanjutan program sangat ditentukan oleh kemampuan institusi lokal dalam mengelola sumber daya dan menjaga keberlanjutan kegiatan secara mandiri (Ostrom, 1990; Uphoff, 1992). Selain itu, lemahnya sinergi antar stakeholder juga menjadi faktor penghambat, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian sebelumnya bahwa koordinasi yang tidak efektif dapat mengurangi dampak program pemberdayaan masyarakat (Arifin et al., 2021; Tyas et al, 2025). Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan kapasitas internal dan dukungan eksternal yang berkelanjutan agar program KRPL dapat berkembang secara optimal.

Analisis Stakeholder dalam Pelaksanaan KRPL

Hasil analisis stakeholder dalam pelaksanaan program KRPL di Nagari Panti Selatan menunjukkan adanya variasi tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) di antara para aktor yang terlibat. Berdasarkan pemetaan menggunakan matriks *power-interest*, stakeholder kunci seperti pemerintah nagari dan penyuluh pertanian memiliki tingkat pengaruh yang tinggi, terutama dalam hal pengambilan keputusan, penyediaan dukungan teknis, serta fasilitasi program. Sementara itu, Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pelaksana utama berada pada posisi dengan tingkat kepentingan yang tinggi, namun pengaruhnya masih relatif terbatas dalam menentukan arah program. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan antar stakeholder yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dalam perspektif teori stakeholder, keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola hubungan antar aktor serta memastikan keterlibatan aktif semua pihak sesuai dengan peran dan kepentingannya (Freeman, 1984; Reed et al., 2009).

Lebih lanjut, hasil pemetaan menunjukkan bahwa beberapa stakeholder dengan pengaruh rendah namun memiliki kepentingan tinggi, seperti masyarakat anggota KWT, belum sepenuhnya diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap program dan berkontribusi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam jangka panjang. Di sisi lain, stakeholder dengan pengaruh tinggi belum sepenuhnya mengoptimalkan perannya dalam mendukung keberlanjutan program, terutama dalam hal integrasi kebijakan dan pendampingan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama menjadi kunci keberhasilan program, bukan sekadar sebagai penerima manfaat (Pretty, 1995; Mardikanto, 2017). Selain itu, sinergi antar stakeholder yang lemah juga menjadi kendala dalam menciptakan sistem kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan (Ostrom, 1990; Arifin et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan peran stakeholder secara lebih seimbang agar program KRPL dapat berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Tabel 2. Matriks Analisis Stakeholder Program KRPL di Nagari Panti Selatan

Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh (Power)	Peran dalam Program
Pemerintah Nagari	Sedang	Tinggi	Pengambilan keputusan, dukungan kebijakan, penganggaran program nagari
Dinas Pertanian Kab. Pasaman	Sedang	Tinggi	Penyedia bantuan, koordinasi program, monitoring dan evaluasi
Penyuluh Pertanian	Tinggi	Sedang	Fasilitator teknis, pendampingan lapangan, transfer pengetahuan
Kelompok Wanita Tani (KWT)	Tinggi	Rendah	Pelaksana utama di lapangan, pengelola pekarangan, penerima manfaat langsung
Anggota Masyarakat/Rumah Tangga	Tinggi	Rendah	Penerima manfaat, pelaku pemanfaatan pekarangan, kontributor ketahanan pangan keluarga

Logical Framework Analysis (LFA)

Hasil analisis pohon masalah (problem tree) menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan program KRPL di Nagari Panti Selatan adalah rendahnya keberlanjutan program, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab utama meliputi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, lemahnya kapasitas kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT), terbatasnya pendampingan, serta kurangnya integrasi program dalam kebijakan pembangunan nagari. Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat setelah berakhirnya dukungan eksternal, yang menunjukkan belum terbentuknya kemandirian dalam pengelolaan program. Dampak dari kondisi ini adalah tidak optimalnya pemanfaatan pekarangan serta belum tercapainya tujuan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga secara berkelanjutan. Dalam pendekatan *Logical Framework Analysis (LFA)*, pemetaan hubungan sebab-akibat ini penting untuk memahami akar masalah secara sistematis sehingga intervensi yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran (DFID, 2009; Gasper, 2000). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kegagalan program berbasis masyarakat seringkali disebabkan oleh ketidaktepatan dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan hubungan antar faktor yang mempengaruhinya (Tyas et al, 2025; Arifin et al., 2021).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pohon tujuan (*objective tree*) disusun sebagai transformasi dari permasalahan menjadi kondisi yang diharapkan melalui intervensi yang terarah. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya keberlanjutan program KRPL berbasis pemberdayaan masyarakat dan kemandirian kelompok. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan KWT, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pendampingan, integrasi program dalam pembangunan nagari, serta pengembangan nilai ekonomi pemanfaatan pekarangan. Transformasi dari problem tree ke objective tree mencerminkan logika intervensi yang sistematis, di mana setiap penyebab masalah dikonversi menjadi tujuan yang harus dicapai melalui strategi yang tepat. Dalam kerangka LFA, penyusunan objective tree menjadi dasar dalam merumuskan indikator kinerja, sumber verifikasi, serta asumsi eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program (Gasper, 2000). Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Pretty, 1995; Mardikanto, 2017).

Tabel 3. Logical Framework Analysis (LFA) dalam Revitalisasi Program KRPL

Hierarki Tujuan	Indikator Kinerja	Sumber Verifikasi	Asumsi (Faktor Eksternal)
GOAL			
Meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga, perbaikan gizi, dan pencegahan stunting melalui pemanfaatan pekarangan yang berkelanjutan	1. Peningkatan keberagaman konsumsi pangan rumah tangga 2. Menurunnya prevalensi risiko masalah gizi dan stunting pada rumah tangga sasaran	1. Data survei konsumsi pangan 2. Laporan kesehatan masyarakat	1. Tidak terjadi krisis pangan nasional atau regional 2. Kebijakan nasional dan daerah terkait ketahanan pangan tetap mendukung pemanfaatan pekarangan

Hierarki Tujuan	Indikator Kinerja	Sumber Verifikasi	Asumsi (Faktor Eksternal)
PURPOSE Meningkatnya keberlanjutan Program KRPL berbasis pemberdayaan masyarakat dan kemandirian kelompok	1. Kelompok KRPL tetap aktif dalam jangka panjang 2. Aktivitas pemanfaatan pekarangan berlanjut meskipun tanpa tambahan bantuan	1. Laporan kelompok KRPL 2. Hasil monitoring penyuluh	1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif stabil
OUTPUT 1 Meningkatnya intensitas dan kualitas pendampingan serta monitoring Program KRPL	1. Frekuensi pendampingan meningkat 2. Tersedianya laporan monitoring berkala	1. Laporan pendampingan 2. Catatan kegiatan penyuluhan	1. Stabilitas kelembagaan penyuluhan tetap terjaga
OUTPUT 2 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Program KRPL	1. Kegiatan kelompok berjalan rutin 2. Tingkat kehadiran anggota kelompok stabil	1. Daftar hadir kelompok 2. Notulen kegiatan	1. Kondisi sosial masyarakat relatif kondusif
OUTPUT 3 Berkembangnya manfaat ekonomi rumah tangga dari pemanfaatan pekarangan	1. Adanya pemanfaatan hasil pekarangan bernilai ekonomi 2. Peningkatan pendapatan tambahan rumah tangga	1. Laporan kelompok 2. Hasil wawancara rumah tangga	1. Akses pasar lokal tetap tersedia 2. Harga komoditas relatif stabil
OUTPUT 4 Menguatnya kelembagaan pendukung dan integrasi KRPL dalam program nagari	1. KRPL terintegrasi dalam dokumen perencanaan nagari 2. Dukungan kebijakan nagari tersedia	1. Dokumen RPJM/RKP Nagari 2. Keputusan pemerintah nagari	1. Komitmen pemerintah nagari tidak berubah secara drastis 2. Stabilitas kebijakan pembangunan nagari terjaga
Hierarki Tujuan	Indikator Kinerja	Sumber Verifikasi	Asumsi (Faktor Eksternal)
ACTIVITIES 1. Intensifikasi pendampingan dan monitoring 2. Pelatihan dan pembinaan kelompok KRPL 3. Fasilitasi pengembangan nilai tambah hasil pekarangan 4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemerintah nagari	INPUT: 1. SDM penyuluh 2. Anggaran program 3. Sarana dan prasarana KRPL	1. Dokumen anggaran 2. Laporan kegiatan	1. Kebijakan Anggaran kondusif mendukung KRPL 2. Kondisi iklim dan cuaca relatif mendukung kegiatan di lahan pekarangan

Sumber: Analisis LFA, 2025

Pada Tabel 3 dapat dilihat hasil analisis LFA yang menunjukkan bahwa hierarki tujuan program KRPL dapat dirumuskan secara terstruktur mulai dari *goal*, *purpose*, *output*, hingga *activities*. Pada tingkat goal, program diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, perbaikan gizi, serta pencegahan stunting melalui pemanfaatan pekarangan yang berkelanjutan, dengan indikator seperti peningkatan keberagaman konsumsi pangan dan penurunan risiko masalah gizi. Pada tingkat purpose, fokus diarahkan pada keberlanjutan program berbasis pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan tetap aktifnya kelompok KRPL dan berlanjutnya kegiatan meskipun tanpa bantuan eksternal.

Sementara itu, pada tingkat output, intervensi difokuskan pada peningkatan pendampingan, partisipasi masyarakat, pengembangan manfaat ekonomi, serta penguatan kelembagaan dan integrasi program dalam nagari. Setiap tingkatan tujuan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja, sumber verifikasi, serta asumsi eksternal seperti stabilitas sosial ekonomi, dukungan kebijakan, dan akses pasar yang mempengaruhi keberhasilan program (Gasper, 2000). Pendekatan ini menegaskan bahwa

keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang harus diantisipasi dalam perencanaan.

Pada tingkat operasional, LFA juga menekankan pentingnya keterkaitan antara activities dan input sebagai dasar implementasi program. Kegiatan seperti intensifikasi pendampingan, pelatihan kelompok, pengembangan nilai tambah produk pekarangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk mencapai output yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut didukung oleh input berupa sumber daya manusia (penyuluh), anggaran program, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam perspektif manajemen program, keterkaitan logis antara input–activities–output–outcome menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Selain itu, keberhasilan implementasi juga sangat bergantung pada asumsi eksternal seperti kondisi iklim, stabilitas kebijakan, serta dukungan anggaran yang kondusif. Dengan demikian, analisis LFA tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program agar tetap adaptif terhadap dinamika kondisi lapangan (Gasper, 2000; Arifin et al., 2021).

Model Revitalisasi Program KRPL Berbasis Masyarakat

Model revitalisasi Program KRPL yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan bentuk sintesis dari hasil evaluasi program, analisis stakeholder, serta analisis permasalahan dan tujuan pengembangan program. Model ini dirancang dengan pendekatan berbasis masyarakat (*community-based approach*) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Secara konseptual, model ini dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram alur yang menggambarkan hubungan antara komponen input, proses, output, dan outcome secara sistematis. Model tersebut menekankan pentingnya integrasi antara aspek teknis, sosial, dan kelembagaan dalam mendukung keberhasilan program. Dalam perspektif pemberdayaan, model ini sejalan dengan pendekatan yang menekankan peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat sebagai kunci keberlanjutan program (Pretty, 1995); Mardikanto, 2017). Selain itu, pendekatan ini juga relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (FAO, 2019).

AKTOR & KELEMBAGAAN: Kelompok KRPL – Rumah Tangga – Penyuluh – Pemerintah Nagari – Dinas Pertanian			
INPUT Dukungan kebijakan SDM penyuluh Sarana produksi Anggaran program	KONDISI AWAL Aktivitas rendah Kelembagaan lemah Ketergantungan bantuan Partisipasi menurun	STRATEGI REVITALISASI 1. Penguatan pendampingan & monitoring 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Pengembangan ekonomi pekarangan 4. Penguatan kelembagaan & integrasi nagari	OUTPUT Intensitas pendampingan meningkat Partisipasi masyarakat meningkat Pekarangan lebih produktif Kelembagaan KWT semakin kuat
OUTCOME: Keberlanjutan Program KRPL berbasis kemandirian masyarakat			
IMPACT: Ketahanan pangan rumah tangga, Perbaikan gizi dan pencegahan stunting			

Gambar 1. Model Revitalisasi Program KRPL Berbasis Pendekatan Terpadu

Pada Gambar 1 dapat dilihat komponen model revitalisasi terdiri dari empat bagian utama, yaitu input, proses, output, dan outcome yang saling terhubung dalam satu sistem yang dinamis. Komponen input meliputi dukungan kebijakan, sumber daya manusia, sarana produksi, serta pendampingan dari berbagai stakeholder. Pada tahap proses, dilakukan penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan partisipasi melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Output yang diharapkan berupa meningkatnya aktivitas pemanfaatan pekarangan dan berfungsinya kelembagaan kelompok secara lebih efektif. Sementara itu, outcome yang dituju adalah meningkatnya ketahanan

pangan rumah tangga serta kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Kerangka ini sejalan dengan model evaluasi program yang menekankan pentingnya keterkaitan antara input, proses, dan hasil dalam mencapai tujuan pembangunan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Gasper, 2000). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan program berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh keberlanjutan proses pemberdayaan yang terjadi dalam setiap tahapan program (Sraboni et al., 2014).

Dalam model ini, peran stakeholder menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan implementasi program. Pemerintah nagari berperan dalam menyediakan dukungan kebijakan dan penganggaran, sementara penyuluh pertanian berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping teknis bagi masyarakat. KWT menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan, sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku utama dalam pemanfaatan pekarangan. Sinergi antar stakeholder menjadi penting untuk menciptakan sistem kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan. Dalam teori stakeholder, kolaborasi yang efektif antar aktor dengan berbagai kepentingan dapat meningkatkan keberhasilan program pembangunan (Freeman, 1984; Reed et al., 2009). Selain itu, dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program menjadi faktor kunci dalam menciptakan keberlanjutan (Ostrom, 1990; Pretty, 1995). Dengan demikian, model revitalisasi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam menjawab permasalahan nyata di lapangan.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengevaluasi pelaksanaan Program KRPL di Nagari Panti Selatan dan merumuskan model revitalisasi berbasis masyarakat. Secara substantif, hasil evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa program memperoleh skor 50 persen (12 dari 24) yang berada pada kategori cukup baik. Meskipun program memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat (context) serta didukung oleh input awal berupa bantuan dan pelatihan, namun pada aspek proses dan hasil masih terdapat berbagai kelemahan signifikan, yaitu penurunan tingkat kehadiran anggota dari 78 persen menjadi 34 persen, hanya 31 persen anggota yang masih aktif di tahun kedua, serta 82 persen hasil produksi hanya untuk konsumsi sendiri tanpa nilai ekonomis tambahan.

Analisis stakeholder mengidentifikasi adanya ketimpangan distribusi peran dan pengaruh antar aktor, di mana KWT sebagai pelaksana utama memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh rendah dalam pengambilan keputusan, sehingga berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan terhadap program. Analisis LFA secara sistematis mengungkap bahwa akar permasalahan utama adalah ketergantungan terhadap bantuan eksternal, lemahnya kapasitas kelembagaan KWT, terbatasnya intensitas pendampingan, serta belum terintegrasinya KRPL dalam kebijakan pembangunan nagari.

Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menghasilkan model revitalisasi Program KRPL berbasis masyarakat yang menekankan pada empat strategi kunci: (1) penguatan kelembagaan kelompok melalui peningkatan kapasitas manajerial KWT; (2) intensifikasi pendampingan dengan frekuensi minimal empat kali per bulan; (3) integrasi program dalam dokumen perencanaan nagari (RPJM/RKP Nagari); serta (4) pengembangan orientasi ekonomi pemanfaatan pekarangan. Model ini disusun berdasarkan kerangka input-proses-output-outcome yang saling terintegrasi dan menempatkan kolaborasi antar stakeholder sebagai elemen kunci keberlanjutan program. Keberhasilan implementasi model ini sangat bergantung pada komitmen berbagai pihak, baik pemerintah, penyuluh, maupun masyarakat, dalam menciptakan sistem kelembagaan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan (Mardikanto, 2017; Arifin et al., 2021; Ostrom, 1990).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Darma, R., Fahmid, I. M., & Irawan, A. (2023). Determinants of household food security during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Sustainability*, 15(5), 4131.
- Arifin, B., Zakaria, W. A., & Hartono, S. (2021). Community-based food security program sustainability in Indonesia: Lessons from KRPL implementation. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 11(2), 85–94. <https://doi.org/10.18488/journal.1005/2021.11.2/1005.2.85.94>
- BPS Kabupaten Pasaman. (2023). Kabupaten Pasaman dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.

- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- DFID. (2009). *Logical framework analysis: Guidance notes*. Department for International Development.
- FAO. (2019). *The state of food security and nutrition in the world*. Food and Agriculture Organization.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, MA: Pitman.
- Gasper, D. (2000). Evaluating the 'logical framework approach' towards learning-oriented development evaluation. *Public administration and development*, 20(1), 17-28.
- Healey, P. (2004). The treatment of space and place in the new strategic spatial planning in Europe. *International journal of urban and regional research*, 28(1), 45-67.
- Kementerian Pertanian. (2020). *Pedoman pelaksanaan program kawasan rumah pangan lestari*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kirana, B., Sugihardjo, S., & Widiyanti, E. (2024). Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Wanita Tani dalam Program Pekarangan Pangan Lestari. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 20(3), 281-292.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.
- Mota, A. A., Lachore, S. T., & Handiso, Y. H. (2019). Assessment of food insecurity and its determinants in the rural households in Damot Gale Woreda, Wolaita zone, southern Ethiopia. *Agriculture & Food Security*, 8(1), 11.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World development*, 23(8), 1247-1263.
- Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. *Science*, 302(5652), 1912-1914.
- Purwantini, T. B., Saptana, S., & Suharyono, S. (2012). Program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di Kabupaten Pacitan: analisis dampak dan antisipasi ke depan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(3), 239-256.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*, 90(5), 1933-1949.
- Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development?. *Regional studies*, 47(7), 1034-1047.
- Sisha, T. A. (2020). Household level food insecurity assessment: Evidence from panel data, Ethiopia. *Scientific African*, 7, e00262.
- Sraboni, E., Malapit, H. J., Quisumbing, A. R., & Ahmed, A. U. (2014). Women's empowerment in agriculture: What role for food security in Bangladesh. *World development*, 61, 11-52.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31-62). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4
- Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Sugiarto, S., Wardana, M. F., Ningsih, D. R., Zain, M., & Aini, J. N. (2021). Lahan pekarangan sebagai kawasan rumah pangan lestari (KRPL): Upaya peningkatan nilai fungsi lahan dengan sistem vertikultur. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 2(3), 221-226.
- Tyas, W., Azizah, A. N., Assyqin, M. H., & Kuernianti, D. (2025). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga. *Jurnal Abdi Insani*, 12(12), 6680-6688.
- Uphoff, N. (1996). Learning from Gal Oya-Possibilities for participatory development and post-Newtonian social science. 103-107.